

AWAS RADIKALISME MASUK KAMPUS

BASIS

menembus fakta

Sosok *Criticus Indonesianus*

Berkabar
Buku Jassin

Peluh Para
Penerjemah

Sastra Digital &
Nilai Religius

Foto Dokumentasi HB JASSIN MUDA

EDISI KHUSUS 100 TAHUN HB JASSIN

Rp 25.000.00

NOMOR.07 - 08. TAHUN KE-66 2017

JURNALISME SERIBU MATA
BASIS
menembus fakta

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.

Jo Ditjen PPG

Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996

Penerbit

Yayasan BP Basis

Anggota SPS ISSN: 0005-6138

Penasihat

Franz Magnis-Suseno

P Swantoro

Pemimpin Umum

Sindhunata

Pemimpin Redaksi

A. Setyo Wibowo

Wakil Pemimpin Redaksi

A. Sudiarta

Redaktur Pelaksana

A. Bagus Laksana

Wakil Redaktur Pelaksana

Purnawijayanti

Redaksi

B. Hari Juliawan

Heru Prakosa

B. Rahmanto

C. Bayu Risanto

Redaktur Artistik

Hari Budiono

Purnawijayanti

Promosi/ Iklan

Slamet Riyadi, A. Yulianto

Administrasi/ Distribusi

Maria Dwijayanti

Agustinus Mardiko

Keuangan

Francisca Triharyani, Ani Ratna Sari

Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta

Telepon: (0274) 6508836, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:

basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: basismajalah@yahoo.com

Rekening:

BCA Sudirman Yogyakarta

No. 0370285110 a.n. Sindhunata

BRI Cik Ditiro Yogyakarta

No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

BNI Cab. Yogyakarta No. 1952000512 a.n. Bpk Sindhunata

TANDA TANDA ZAMAN / **Heru Prakosa**

Kala Kata Mendakwa ... 2

KACABENGGALA / **A. Bagus Laksana**

Awas, Radikalisme Masuk Kampus! ... 4

100 Tahun HB Jassin / **Fauzi Sukri**

HB Jassin: *Sosok Criticus Indonesianus* ... 13

100 Tahun HB Jassin / **Han Putro Widyo**

HB Jassin di Luar Ingtan ... 22

100 Tahun HB Jassin / **Arif Fitra Kurniawan**

Peluh Para Penerjemah ... 29

100 Tahun HB Jassin / **Yusri Fajar**

Makanan, Relasi Sosial, dan Identitas ... 36

100 Tahun HB Jassin / **Dian Nurrachman**

Sastra Digital dan Nilai Religius ... 43

100 Tahun HB Jassin / **Hamzah Muhammad**

Ibu Memperkenalkan Namanya,

Saya Membaca Ceritanya ... 48

100 Tahun HB Jassin / **Saifur Rohman**

Sastra Indonesia sebagai Catatan Kaki Jassin ...

54

100 Tahun HB Jassin / **Bandung Mawardi**

Berkabar Buku Jassin ... 57

100 Tahun HB Jassin / **B. Rahmanto**

Seperti Jassin, Pengajaran Sastra pun

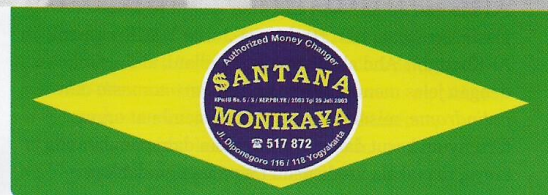
Mulai Dilupakan ... 64

 **Santana Prima Tour**
your travelling partner

Jl. Diponegoro 116, Yogyakarta ☎ 513873

Kami melayani:

- * Reservasi e-tiket pesawat dalam dan luar negeri
- * Reservasi e-tiket kereta api
- * Reservasi e-voucher hotel dalam dan luar negeri
- * Paket tour dalam dan luar negeri
- * Pembuatan kartu identitas pelajar internasional/ ISIC



* MICE
* Pengurusan paspor, visa dan asuransi perjalanan
* Medical evacuation & charter flight
* Money changer

Seperti Jassin, Pengajaran Sastra pun Mulai Dilupakan

B . R A H M A N T O

Barangkali, pada ulang tahunnya yang ke-100 (31 Juli 1917 - 11 Maret 2000), tidak banyak anak sekolah yang kenal Hans Bague Jassin dan perannya bagi sastra Indonesia modern.

Jangan-jangan, para guru, mahasiswa jurusan pendidikan bahasa dan sastra, termasuk para dosennya, juga sudah melupakannya. Padahal, sampai hari ini, dalam pelajaran sastra sejak SMP sampai SMA/SMK/MAN mereka masih dijejali nama-nama seperti: siapa saja pengarang dan karya-karya Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, dan bahkan Angkatan 66. Atau juga diajarkan kesenangan H.B. Jassin menjuluki seorang pengarang seperti Amir Hamzah Raja Penyair Pujangga Baru, Chairil Anwar Pelopor Penyair Angkatan 45, M. Balfas: Manusia Bugil, Mohamad Ali Pengarang Lapar, dan Toto Sudarto Bachtiar Penyair Ibukota Senja. Hal semacam itu sampai sekarang masih sering ditanyakan oleh guru Bahasa Indonesia dalam ujian semesteran model pilihan ganda dengan empat jawaban (yang selalu dikritik oleh banyak ahli pendidikan, tetapi tak pernah digubris) dan bahkan dalam soal Ujian Nasional yang kini mulai dikritisi eksistensinya.

Demikian juga *seabrek* predikat yang disandang H.B. Jassin, antara lain sebagai dokumentator sastra (sehingga ia memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dari UI tahun 1975) yang sebagian besar hasil ketekunannya kini tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta; sebagai redaktur abadi majalah sastra dan budaya sejak majalah (*Pujangga Baru* (1940), *Panji Pustaka* (1942-1945), *Mimbar Indonesia* (1947-1966), *Zenith* (1951-1954), *Bahasa dan Budaya* (1952-1963), *Kisah* (1953-1956), *Seni* (1955), sampai majalah *Sastra* (1961-1969)

dan *Horison* (1966-meninggal). Ia juga dikenal sebagai penerjemah sastra dunia (antara lain *Max Havelaar* karya Multatuli, dan *Also sprach Zarathustra* karya Nietzsche); dan pembela sastra Indonesia terkait kasus tuduhan terhadap Chairil Anwar (1950) dan HAMKA (1962) sebagai plagiat.

Begitu pula kasus-kasus sastra dan budaya yang kontroversial seperti: kasus cerpen "Langit Makin Mendung" karya Kipanjikusmin (majalah *Sastra* Agustus 1968); kasus tiadanya Angkatan 66 dalam sastra Indonesia yang dilontarkan oleh Harry Aveling (1972); kasus Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir di Bandung (1974) sebuah dagelan ala Darmanto Yt (bertindak sebagai hakim) dan Slamet Sukirnantanto (sebagai jaksa) yang mendakwa kehidupan puisi Indonesia akhir-akhir ini tidak sehat, tidak jelas, dan brengsek lantaran editornya (H.B. Jassin) sudah harus dipensiun sebagai kritikus; sampai gelar H.B. Jassin sebagai paus bagi kritikus-kritikus sastra Indonesia yang disampaikan oleh Gayus Siagian dalam Simposium Sastra Fakultas Sastra UI, Desember 1956 (dan dimuat kembali dalam majalah *Sastra*, Januari 1957). Itulah antara lain malang melintangnya H.B. Jassin.

Dari semua itu, warisan terbesar yang masih kasat mata adalah Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin di Taman Ismail Marzuki. Akan tetapi, apabila kita berkunjung ke sana, dokumentasi yang begitu melimpah itu, semakin hari semakin tak terawat, dan memprihatinkan, mirip dengan situasi pengajaran sastra di sekolah menengah kita dewasa ini: makin lama makin berkurang, disisihkan, dan (di)(ter)pinggirkan.

Apalagi, dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 15 Th. 2017 tertanggal 12 Januari 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh Menristekdikti Mohamad Nasir; nama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia harus diubah menjadi Program Studi *Pendidikan Bahasa Indonesia* saja. Mengapa bisa begitu? Apa dampaknya bagi pengajaran sastra di sekolah menengah dan mahasiswa Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia?

Awalnya adalah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 154 Tahun 2014 tertanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi yang ditandatangani Mendikbud Mohammad Nuh. Pasal 14 Permen itu: "Perguruan tinggi wajib menginformasikan perubahan nama program studi dan gelar kepada masyarakat." Pasal 15 a: "Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a. Nama program studi pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Dalam Lampiran no. 47, 48, dan 49 tertulis nama Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia untuk program D-3, S-1, dan S-2. Nah, untuk Universitas Sanata Dharma (USD) misalnya sejak berubah dari IKIP menjadi Universitas, program studinya bernama Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan Permen itu, maka prodinya

berganti nama menjadi PBI (Program Studi Bahasa Indonesia) bukan lagi PBSI (Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia). Runyamnya, di USD, nama PBI sudah *beken*, dan sudah lebih dari setengah abad dipakai untuk kepanjangan nama prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Alumni PBI yang sudah banyak bertebaran berkarya di seluruh Indonesia bakalan terkejut-kejut ketika mereka temu alumni. Sebutan alumni PBI bukan lagi diartikan sebagai alumni Pendidikan Bahasa Inggris yang mereka bangga-banggakan, tetapi akibat Permen itu ... alamak PBI berarti Program Studi Bahasa Indonesia.

Memang, akibat Permen itu tidak seketika semua Prodi PBSI berubah menjadi PBI (termasuk PBSI di USD hingga kini tetap memakai nama itu). Mengemuka pro dan kontra yang cukup panas tentang hal ini dalam Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) XXXVIII di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, 2-3 November 2016, dan juga dalam lokakarya IKAPROBSI untuk merumuskan capaian pembelajaran Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang dapat dijadikan acuan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam kegiatan pengembangan kurikulumnya.

Menurut pengamatan Prof. Dr. Sarwiji Suwandi Kepala Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Pascasarjana Universitas Sebelas Maret dalam makalahnya "Membangun Nilai Humanitas dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: sebuah Keniscayaan" yang diselenggarakan Program Studi Pendidikan



Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP USD 24 Mei 2017, terjadi polarisasi pandangan. Yang setuju alasannya, bahwa tujuan pengaturan nomenklatur itu untuk (1) meningkatkan pengakuan yang setara dari masyarakat ilmiah internasional terhadap hasil pendidikan Indonesia; (2) adanya berbagai kasus lulusan PT di Indonesia yang tidak diakui karena nama program studi tidak dikenal atau dilaksanakan pada jenjang yang berbeda; (3) meningkatkan mobilitas mahasiswa dan lulusan oleh pemangku kepentingan nasional dan internasional; dan (4) meningkatkan kerja sama dengan PT luar negeri.

Sementara itu, yang tidak setuju memberi alasan bahwa penghilangan kata *sastra* dikhawatirkan akan berdampak tidak baik. Kajian sastra dan pembelajaran sastra menjadi tereduksi, terpinggir, atau makin asing. Hal itu tampak beralasan, terlebih jika menganalogikan dengan kurikulum yang ada di jenjang pendidikan dasar dan menengah, khususnya pada Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kurikulum itu, terlebih di SD, sastra cenderung terpinggirkan, demikian juga di perguruan tinggi. Sungutan bermunculan, "Label *sastra*-nya masih ada dalam nama program studi saja, muatan sastranya kurang mendapat perhatian proporsional, apalagi kalau tidak tertulis?" "Kecemasan, kegalauan, dan keresahan para penjaga gawang sastra, para sastrawan, dan tokoh pengajaran sastra tentu saja tidak bisa dinafikkan", komentarnya secara lisan. "Meskipun kata *sastra* dihapus," sambungnya, "tetapi porsi sastra dalam kurikulumnya akan tetap dijamin utuh". Inilah janji mereka.

Melihat pro dan kontra semakin memanas lahirilah Permenristekdikti RI No. 15 Th. 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi. Pasal 7 ayat (1) berbunyi garang seperti ini: "Perguruan tinggi wajib menyesuaikan nama Program Studi dengan daftar nama Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak daftar nama Program Studi ditetapkan." Akan tetapi, bagi program studi yang tetap *ngeyel*, artinya masih tetap mempertahankan nama prodinya PBSI dan bukan PBI, Permenristekdikti memberikan usulan pemecahan seperti yang tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2): "Perguruan tinggi dapat mengajukan usul penambahan dan/atau perubahan nama Program Studi kepada Menteri ... disampaikan secara tertulis dengan melampirkan: a. dokumen kurikulum; b. capaian pelajaran; dan c. rujukan pengembangan keilmuan."

Baiklah, yang kontra masih memiliki waktu satu tahun untuk mengajukan usul penambahan nama Program Studi kepada Menteri dengan melampirkan seperti tercantum dalam ayat (2).

Yang menarik untuk dipertanyakan, apa sebenarnya tujuan Permenristekdikti RI No. 15 Th. 2017 itu? Apakah untuk mengantisipasi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang sudah diberlakukan? Yang terang, jika kita cermati, Pasal 4 ayat (2): Penamaan Program Studi bertujuan untuk (a) memfasilitasi pertumbuhan keilmuan baru di Indonesia melalui penyelenggaraan Program Studi baru; (b) memfasilitasi penyiapan tenaga kerja profesional pada bidang baru dan lebih beragam; (c) meningkatkan pengakuan yang setara dari masyarakat ilmiah internasional dan pengguna lulusan terhadap hasil Pendidikan Tinggi di Indonesia; dan (d) meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri.

Masya Allah, jika itu salah satu tujuannya, siapakah sebenarnya pengguna lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia itu? Bukankah lebih banyak sekolah menengah di Indonesia sendiri? Mungkin kelak ada yang akan menjadi guru Bahasa Indonesia di Australia atau Amerika Serikat misalnya, mengapa harus mencoret kata *sastra*? Rasa-rasanya mahasiswa asing yang kuliah di Indonesia justru sastra dan budaya yang lebih banyak mereka persoalkan ketimbang mengutak-atik fungsi awalan ber- atau mana kata yang benar dan yang baku, mana yang santun dan tak santun dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

Dan lagi, seperti alasan yang dipaparkan oleh yang kontra di atas, dengan dihilangkan kata *sastra*, dampaknya bukan hanya pengajaran sastra di sekolah menengah dan perguruan tinggi calon pemasok gurugurunya akan kurang proporsional dan dipinggirkan, tetapi secara prinsip memasukkan pengajaran sastra sebagai bagian dari pengajaran bahasa sungguh gegabah dan keliru. Pengajaran sastra memang tidak dapat dipisahkan dari pengajaran bahasa. Akan tetapi, tujuan akhir pengajaran bahasa tidaklah sama dengan pengajaran sastra. Pengajaran bahasa merupakan sarana penalaran (Oemarjati, 1979); sedangkan pengajaran sastra mengembangkan potensi afektif, bukan kognitif. Tujuan akhir pengajaran sastra adalah memperkaya pengalaman siswa dan menjadikannya lebih tanggap terhadap peristiwa-peristiwa manusiawi, pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai, baik dalam konteks individual, maupun sosial. Wahana ke arah itu adalah ketrampilan membaca karya sastra, mendengar

bacaan sastra, berbicara sastra dalam arti mementaskan lakon sastra, dan menulis sastra baik puisi maupun fiksi. Untuk dapat menyelenggarakan pengajaran sastra dengan baik, diperlukan kesabaran dan kecermatan, di samping kepekaan dan keterbukaan para pengajarnya. Hal ini memang tidak mudah. Apalagi kalau pengajaran sastranya kelak diperlakukan seperti pengajaran bahasanya yang serba bernalar dan kognitif, minta ampunlah jadinya!

Untuk masyarakat pemakainya, bahasa merupakan alat komunikasi yang universal. Sebaliknya, sastra bersifat khas, unik, baik dari segi proses penciptaan maupun eksistensinya. Oleh karena itu, *bahasa sastra* bersifat personal, sekaligus komunal. Setiap karya sastra menyajikan “sesuatu” yang universal, tetapi penggarapannya menuruti subjektivitas penciptanya (Oemarjati, 1992). Jadi, hakikat sastra adalah suatu dikotomi: menghadirkan dua kutub yang berlawanan, namun berada dalam tegangan yang dinamis. Penggerak utama dinamikanya adalah *nilai*.

Jika siswa kita hadapi sebagai subjek pengajaran, maka harus disadari bahwa setiap siswa merupakan individu, sekaligus suatu totalitas yang kompleks, yang menyimpan sejumlah *kecakapan*. Dalam kegiatan belajar-mengajar, kecakapan itulah yang perlu dikenali, ditumbuhkembangkan. Berkaitan dengan pengajaran sastra (Rahmanto, 2002), kecakapan yang perlu dikembangkan itu adalah yang bersifat (1) indrawi; (2) nalar; (3) afektif; (4) sosial; dan (5) religius. Kecakapan (1), (2), dan (3) mencakup aspek personal kehidupan manusia, sedangkan kecakapan (4) dan (5) melengkapinya sebagai insan seutuhnya. Dengan kata lain, pengembangan kelima sifat kecakapan itu sejalan dengan mengasah, mengasuh, dan mengasihi *nilai-nilai* yang disajikan setiap karya sastra pada umumnya karena tema sastra mencakup ketiga segi hakikat kehidupan manusia, yaitu yang bersifat personal, sosial, dan religius.

Oleh karena itu, mengapresiasi sastra berarti merespons dengan kemampuan afektif: peka terhadap nilai-nilai yang tersurat atau tersirat dalam karya sastra dalam kerangka tematik yang merengkuhnya, sekaligus berupaya memetakan pola tata nilai yang diperolehnya ke dalam proporsi yang sesuai dengan konteks persoalannya.

Nah, bukankah pengajaran sastra amat diperlukan dalam penanaman kepekaan kepada para siswa-siswi terhadap nilai-nilai yang jauh hari sudah dilakukan oleh

H.B. Jassin melalui apresiasi, kritik, dan klipings sastra yang tersedia di pusat dokumentasinya? Tegakah kita untuk melupakannya? Bukankah pendidikan di semua lini persekolahan dewasa ini sedang menggalakkan pendidikan karakter alias pendidikan nilai-nilai yang bahannya berlimpah dalam karya sastra? ●

B. Rahmanto,

Mengajar Kajian Sastra di Prodi Sastra Indonesia dan
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
(masih utuh)
Universitas Sanata Dharma

RUJUKAN

- Eneste, Pamusuk, *H.B. Jassin Paus Sastra Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1987.
- Jassin, H.B., *Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra Dunia* (Ed. Pamusuk Eneste), Jakarta: Gramedia, 1983.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 154 Th. 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- Rahmanto, B., *Metode Pengajaran Sastra* (cet. ke-9), Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Suwandi, Sarwiji, “Membangun Nilai Humanitas dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Sebuah Keniscayaan” *Seminar Nasional* yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017.
- Oemarjati, Boen S., “Pengajaran Sastra Indonesia dan Pembinaan Apresiasi Sastra”. *Basis* 28(5): 149–158. (Makalah Kongres Bahasa Indonesia III, Jakarta, 28 Oktober–3 November 1978), 1979.
- Oemarjati, Boen S., “Dengan Sastra Mencerdaskan Siswa: Memperkaya Pengalaman dan Pengetahuan”. Dalam: Sumardi, Muljanto (ed.). 1992. *Berbagai Pendekatan dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Oemarjati, Boen S., “Pengajaran Sastra pada Pendidikan Menengah di Indonesia: Quo Vadis?” *Konferensi Internasional ke-16 HISKI*, Palembang, 18-21 Agustus, 2005.